KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Proyek kelengkapan rumah Anggota DPR digelembungkan
Tanggal : Sabtu, 25 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

PEMBERANTASAN KORUPSI

Proyek Kelengkapan Rumah Anggota DPR Digelembungkan

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga telah terjadi *mark up* atau penggelembungan harga pada proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Penggelembungan tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

Untuk kepentingan penyidikan, nilai kerugian negara itu tengah dihitung. Untuk itu, KPK bekerja sama dengan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat (24/10/2025), dalam beberapa hari, penyidik KPK bekerja secara simultan dengan auditor BPKP. Pemeriksaan paralel tersebut, ujarnya, dilakukan terhadap sejumlah saksi dalam rangka penghitungan kerugian negaranya.

"Dengan pemeriksaan secara paralel berbarengan antara penyidik KPK dan auditor BPKP, harapannya bisa segera selesai penyidikannya," ujar Budi.

Dugaan korupsi ini terkait dengan pengadaan sarana dan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR di Ulujami dan Kalibata, Jakarta, untuk tahun anggaran 2020. Nilai proyek pengadaan tersebut diketahui sekitar Rp 120 miliar.

Dari pekerjaan itu, KPK menduga telah terjadi penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar selaku pengguna anggaran. Enam tersangka lainnya diduga berasal dari pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan pihak swasta selaku pelaksana proyek.

Sedianya Indra Iskandar diperiksa KPK pada Jumat, tetapi dia tak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Menurut Budi, Indra tidak bisa memenuhi pemeriksaan karena berhalangan hadir. "Yang bersangkutan sudah menyampaikan surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya sehingga tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini," kata Budi.

Belum ada yang ditahan

Adapun hingga kini KPK belum menahan para tersangka. Alasan penyidik, menurut Budi, karena masih menunggu rampungnya hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP untuk melengkapi berkas perkara.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, posisi jabatan Sekjen DPR sangat strategis dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran di internal DPR.

"Yang menjadi pejabat pengelola anggaran DPR, ya, Sekjen DPR itu. Jadi, anggaran DPR itu di bawah kendali sekjen dalam hal pengelolaannya, peruntukannya," kata Lucius.

Ia menjelaskan, Sekjen DPR menjadi kunci sejak perancangan program hingga pembuatan dan penggunaan anggaran.

Jika sekarang ada temuan dari KPK terkait dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, menurut Lucius, sangat mungkin Sekjen DPR diduga terlibat di dalamnya. Sebab, semua proyek pengadaan barang dan jasa di bawah koordinasi Sekjen DPR. Karena itu, masuk akal KPK memanggil Sekjen DPR.

Dalam perencanaan anggaran dan proyek untuk DPR, sekjen akan membicarakannya dengan pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga, salah satu alat kelengkapan DPR. "KPK mungkin bisa memperluas jangkauan pemeriksaan kepada pihak terkait di alat kelengkapan DPR yang biasanya bersama Sekjen DPR membicarakan proyek-proyek pengadaan di DPR," kata Lucius.

(WIL)